

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung

Sjahna Dzuliazahra^a, Endah Mustika Ramdani^b,
 Hendrikus T. Gedeona^c, dan Nita Nurliawati^d

^{a,b,c,d} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : a syahnadzuliazahr@gmail.com, b endahmustika@gmail.com,

c hendrikusgedeona@gmail.com, d nitanurliawati@yahoo.com

Abstrak

Timbulan sampah yang mendominasi adalah sampah rumah tangga, sehingga terdapat pedoman yaitu kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang masih memiliki kendala dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung belum berhasil karena masih memiliki banyak kendala. Tujuan dan ukuran keberhasilan kebijakan belum tercapai karena pengelolaan sampah rumah tangga belum berjalan sesuai arah kebijakan. Kurangnya SDM, kekurangan fasilitas dan sarana prasarana disebabkan oleh lahan dan anggaran yang kurang. Proses pengawasan yang belum berjalan dengan baik, dan lingkungan masyarakat yang belum kondusif, karena masih banyak masyarakat desa yang kurang sadar dan tidak terlibat aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Strategi dirumuskan menggunakan Analisis SWOT, dan hasilnya strategi WO (*Weakness-Opportunities*) memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Sehingga rekomendasi menurut strategi yang dirumuskan yaitu memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk pengelolaan sampah rumah tangga, membuat gerakan aksi pilah sampah rumah tangga, dan membuat sistem informasi pengelolaan sampah daerah Kabupaten Bandung berbasis website untuk memudahkan monitoring.

Kata Kunci: strategi; implementasi kebijakan; pengelolaan sampah rumah tangga

Implementation Strategy of Household Waste and Household-Like Management in Cileunyi District Bandung Regency

Abstract

*The dominant waste generation is household waste, so there are guidelines, namely policies and strategies for managing household waste and similar households that still have obstacles in their implementation. The research used descriptive methods and qualitative data analysis. The results of the study using the Van Meter, and Van Horn theories show that the implementation of household waste management policies and types of households in Cileunyi District, Bandung Regency, has not been successful because there are still many obstacles. The objectives and measures of the policy's success have not been achieved because household waste management has not been carried out according to the direction of the policy. The lack of human resources, facilities, and infrastructure is caused by insufficient land and budget. The monitoring process has not gone well, and the community environment is not yet conducive because many village communities are not aware and are not actively involved in household waste management. The strategy is formulated using SWOT analysis, and the result is a WO (*Weakness-Opportunities*) strategy to take advantage of opportunities by minimizing weaknesses. So the recommendations according to the developing strategy are to provide community needs for household waste management, create a household waste sorting action movement, and create a website-based information system for waste management in Bandung Regency to facilitate monitoring.*

Keywords: strategy; policy implementation; household waste management

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ke arah yang lebih baik, maka dilaksanakan pembangunan. Pembangunan telah berganti menjadi pembangunan yang bertransformasi ke arah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan terencana dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi masa atau saat ini, tetapi tidak mengorbankan terhadap kebutuhan generasi masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan istilah SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu suatu transformasi dalam agenda secara global dengan 17 tujuan dan 169 capaian hingga tahun 2030. Sachs dalam (Santoso 2019) mengungkapkan pembangunan harus menyesuaikan tujuan dari seluruh aspek yaitu sosial, ekonomi, lingkungan hingga pemerintahan yang baik dalam SDGs. Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan memperhatikan aspek yang terpenting yaitu aspek lingkungan. Jika dalam proses pembangunan memperhatikan aspek dari kelestarian lingkungan, maka manfaat dalam pembangunan dapat dirasakan, dan apabila aspek lingkungan diabaikan akan memunculkan resiko seperti dampak negatif dari pembangunan (Rosana 2018). Dalam memperhatikan aspek lingkungan, harus melihat permasalahan lingkungan salah satunya adalah sampah yang menjadi fenomena sekaligus tantangan di negara Indonesia. Timbulan sampah yang menumpuk tidak dikelola dengan baik akan merusak kelestarian lingkungan. Permasalahan sampah adalah kepentingan publik yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangnya. Timbulan sampah berasal dari banyak sumber dan jenis, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) komposisi sampah berdasarkan sumbernya pada tahun 2021 yaitu sampah rumah tangga 46,49%, sampah perkantoran 5,94%, perniagaan 8,12%, pasar 22,06%, fasilitas publik 5,92%, kawasan 9,24%, dan sampah lainnya 2,23%. Jika melihat data tersebut sampah yang mendominasi adalah sampah rumah tangga.

Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung menjadi perhatian, karena pada tahun 2018 Kabupaten Bandung memproduksi sampah

tertinggi yang menduduki posisi ketiga tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 1.489,04 ton/hari. Tingginya produksi sampah di Kabupaten Bandung dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan sampah, yang diatur dalam Peraturan Daerah 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga diatur dalam kebijakan berbentuk Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Perkiraan potensi timbulan sampah yang diproduksi Kabupaten Bandung akan terus meningkat. Berikut adalah potensi timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Bandung tahun 2018 hingga 2025 sesuai dengan yang terdapat di Jakstrada:



Gambar Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2025

Kabupaten Bandung memiliki 31 kecamatan, dan Kecamatan Cileunyi mendapatkan posisi keempat tertinggi dalam memproduksi sampah, dengan luas wilayah 2.835.146 ha dan jumlah penduduk sebanyak 164.123 jiwa sehingga menghasilkan sampah sebesar 65.649,2 kg/hari. Dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung masih memiliki banyak kendala yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Produksi timbulan sampah rumah tangga yang tinggi sehingga tidak tertanggulangi. Tidak tertanggulangnya sampah akan menyebabkan adanya TPS liat di jalanan.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Kabupaten Bandung membuang akhir sampah di TPA Sarimukti Kab. Bandung Barat yang merupakan pembuangan sampah dari Bandung Raya sehingga kapasitas *overload*. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, tahun 2021 jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti yaitu rata-rata 254,10 ton/hari, sedangkan timbulan sampah yang dihasilkan Kabupaten Bandung sebanyak 1.489,04 ton/hari, sehingga 1.234,94 ton sampah Kabupaten Bandung yang tidak terangkut dan tidak tertanggulangi.

2. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pandangan masyarakat sampai sektor industri terhadap sampah yaitu barang yang tidak memiliki kegunaan. Sebaiknya pemahaman masyarakat diubah, karena sampah memiliki nilai dan berguna jika dikelola dengan baik, dan sampah juga dapat merusak lingkungan (Nizar et al. 2018). Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Cileunyi mengungkapkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menanggapi masalah sampah sehingga menjadi fenomena.
3. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi persoalan serius di Kabupaten Bandung, karena jika kekurangan armada maka banyak timbulan sampah yang tidak tertangani. Kurangnya armada pengangkut sampah, TPS3R, hingga bank sampah perlu diperhatikan. Karena jika tidak adanya fasilitas, masyarakat tidak dapat mengelola sampah dengan baik.
4. Kurangnya konsistensi dalam pengawasan secara langsung oleh pelaksana kebijakan terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Pelaksana kebijakan tidak melihat realitas yang terjadi di lapangan, karena masih banyak kekurangan dalam fasilitas pengelolaan sampahnya.

Kajian tentang pengelolaan sampah telah banyak dilakukan, seperti oleh (Hutagaol, Arif Nasution, and Kadir 2020) yang menyatakan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga, seperti

kurang dalam pengurangan sampah serta penanganan sampah di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu oleh (Nurlina, Muhafidin, and Sukarno 2021) yang mengungkapkan belum efektifnya kebijakan dikarenakan belum terpenuhinya faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut seperti isi kebijakan, aktor kebijakan, target kebijakan, serta faktor lingkungan di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang. Kajian tentang sampah ini penting untuk dilakukan, karena tidak hanya untuk masa kini melainkan untuk perubahan yang terbaik di masa yang akan datang. Sehingga dengan melihat permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi, penelitian dianalisis menggunakan teori pandangan Van Meter dan Van Horn serta perumusan strategi menggunakan analisis SWOT. Kajian memiliki tujuan (1) menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan (2) merumuskan strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

B. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan melalui proses yang kompleks untuk tercapainya kegiatan yang memiliki dampak terhadap tercapainya tujuan. Dampak nyata yang diperoleh dapat dilihat dengan adanya perubahan suatu kondisi yang lebih baik yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran (Purwanto and Sulistyastuti 2015).

Implementasi peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dapat dilakukan secara baik dan maksimal, jika pengelolaan sampah telah mengikuti arah kebijakan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dibagi menjadi dua yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah, sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dilaksanakan melalui:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pemanfaatan sampah; dan
 - c. Pendaauran ulang sampah.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

2. Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dilaksanakan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, proses implementasi kebijakan tersebut masih banyak berkendala dalam beberapa hal. Dalam implementasinya dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mengungkapkan variabel keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

1. Ukuran dan Tujuan

Tujuan peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah tersedianya pedoman berupa dokumen yang dapat mempermudah seluruh *stakeholders* dalam memahami strategi dan arah kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena dalam pengelolaan sampah rumah tangga belum dilaksanakan dengan baik sesuai arah kebijakan. Keadaan di lapangan masih memiliki banyak kendala, yaitu masyarakat terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama masyarakat yang mengetahui kebijakan, dan golongan kedua masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan yang artinya mereka tidak mendapatkan informasi berupa sosialisasi atau pelatihan. Selain itu, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah sehingga golongan masyarakat yang mengetahui kebijakan belum dapat melakukan pengelolaan sampah yang baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan finansial. Kurangnya SDM menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, walaupun kualitas SDM yang

kompeten namun kuantitasnya kurang memadai akan menghambat produktivitas dalam pengelolaan sampah. Namun SDM tersebut diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan membentuk kader B3S (Bandung Bersih Sampah) yang memiliki tugas penanganan sampah sekaligus memberikan contoh dan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik. Fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah terdiri dari armada pengangkut sampah, TPS yang memiliki pengelolaan sampah disebut dengan TPS3R, bank sampah, gerobak/ motor sampah, dll. TPA Sarimukti yang *overload* diatasi dengan adanya pembangunan TPPAS Legok Nangka di Nagrek Kab. Bandung. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana dibuktikan dengan banyaknya tingkat RT/RW maupun Desa di Kecamatan Cileunyi belum terfasilitasi dengan baik, ataupun sarana dan prasarana tersebut memiliki kendala. Fasilitas dan sarana prasarana belum merata dengan baik di Kecamatan Cileunyi, dikarenakan terbatasnya lahan dan anggaran. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah anggaran pengelolaan sampah berasal dari APBD namun terbatas, karena ideal anggaran itu 3-4% dari total APBD namun sekarang hanya 1% bahkan di bawah 1%.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Cileunyi dibagi menjadi formal yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung serta pemerintah Kecamatan Cileunyi, dan informal yaitu suatu kelompok masyarakat, dan kelompok yang dibuat seperti Kader B3S (Bandung Bedas Bersih Sampah). Unit pembagian kerja sudah jelas, namun Kecamatan Cileunyi tidak memiliki UPTD Pengangkutan Sampah, sehingga ditangani oleh UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Bandung belum berjalan maksimal, dikarenakan DLH Kabupaten Bandung masih mencari formula yang tepat untuk proses pengawasan dan pengendalian.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

4. Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil analisis pelaksana kebijakan yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cileunyi sudah mendukung implementasi kebijakan, memiliki kompetensi, mengetahui kebutuhan masyarakat, serta menjaga konsistensi dalam pelayanan pengelolaan sampah seperti pengangkutan sampah oleh DLH Kabupaten Bandung sudah rutin dilaksanakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ini sistemnya *bottom up* melihat kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melakukan kajian atau musrenbang terlebih dahulu.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan yaitu DLH Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, dan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan berjalan dengan baik. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bandung mengungkapkan komunikasi dilakukan berbagai cara melalui media massa elektronik, cetak digital, radio, ataupun dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan pertemuan pertemuan lainnya. Koordinasi antar OPD dilakukan berjenjang dengan baik.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Survey yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bandung yaitu menunjukkan masyarakat 90% mengetahui pengelolaan sampah yang baik dan benar, 20% masyarakat mau melakukan pengelolaan sampah. Lingkungan masyarakat Kecamatan Cileunyi belum sepenuhnya kondusif dan mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Dikarenakan pengelolaan sampahnya beragam sesuai dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat desa masing-masing, dan dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Masyarakat desa terbagi menjadi dua yaitu masyarakat aktif dan tidak aktif. Masyarakat desa yang aktif akan ikut terlibat dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga yang baik sesuai arah kebijakan sehingga dapat menjadikan sampah bernilai secara ekonomi.

Sedangkan masyarakat desa yang tidak aktif tidak peduli dan cenderung menunggu pelayanan dari pemerintah setempat saja. Pengelolaan sampah tiap desa di Kecamatan Cileunyi juga berbeda, karena tidak semua desa memiliki fasilitas seperti TPS, bank sampah, dan lain-lainnya.

Perumusan Strategi

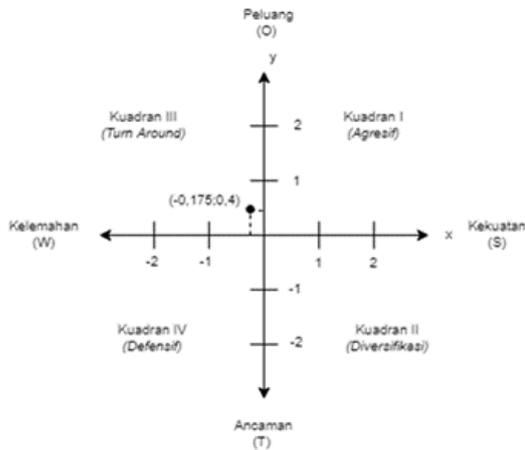
Dalam merumuskan strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*) terdiri dari terdapat peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, pembagian unit kerja yang jelas, terdapat pelaksana yang mendukung dan mengetahui kebutuhan masyarakat, dan komunikasi dan koordinasi berjalan baik antar pelaksana.
2. Kelemahan (*Weakness*) terdiri dari kekurangan SDM, kekurangan fasilitas dan sarana prasarana, kekurangan anggaran, dan pengawasan pengelolaan sampah yang belum berjalan maksimal.
3. Peluang (*Opportunities*) yang ada yaitu sampah dapat bernilai secara ekonomi, pembangunan TPPAS Legok Nangka Nagrek Kabupaten Bandung, masyarakat mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik, dan adanya kader B3S.
4. Ancaman (*Threats*) yang terjadi yaitu produksi sampah yang meningkat, rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, dan tidak melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik dan benar.

Matriks SWOT dengan menggunakan analisis IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*), mendapatkan hasil perhitungan yang diperoleh titik koordinat sumbu x dan sumbu y yaitu (-0,175;0,4). Berdasarkan hasil titik koordinat yang diperoleh, maka digambarkan melalui diagram cartesius sebagai berikut:

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh



Gambar Diagram Cartesius

Diagram cartesius menunjukkan hasil analisis kuadran III mendukung strategi turn-around dengan menggunakan strategi WO, karena dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memiliki peluang yang besar, namun masih mengalami beberapa kendala yaitu kelemahan internal.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menggunakan teori menurut pandangan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel belum dapat dikatakan berhasil, karena masih terkendala dalam banyak hal. Tujuan dan ukuran kebijakan belum dapat sepenuhnya tercapai karena pengelolaan sampah rumah tangga yang belum berjalan sesuai arah kebijakan. Kurangnya SDM, fasilitas dan sarana prasarana disebabkan oleh lahan dan anggaran yang kurang. Proses pengawasan yang belum berjalan dengan baik, karena masih mencari formula untuk pengawasan dan pengendalian yang maksimal. Dan kendala yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat yang belum kondusif, karena masih banyak masyarakat desa yang kurang sadar dan tidak terlibat aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Perumusan strategi yang dapat meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan analisis SWOT. Hasilnya menunjukan kuadran III yang mendukung

strategi WO atau *turn around*. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan pemerintah Kecamatan Cileunyi dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Fasilitas dan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah rumah tangga, seperti meratakan pembangunan TPS3R dan bank sampah di setiap Desa, menyediakan termoplastik untuk pemilahan sampah, gerobak sampah untuk mengangkut sampah ke TPS.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan pemerintah Kecamatan Cileunyi dapat menggelarkan gerakan PIKULAH (Pilah, Kumpul, dan Olah) Sampah di Rumah. Dengan menyertakan kader B3S (Bandung Bedas Bersih Sampah), dan kelompok masyarakat seperti ibu PKK. Melaksanakan kegiatan seperti membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik beserta manfaatnya supaya dapat bernilai dan menguntungkan, dan fasilitasi masyarakat dengan memberikn buku panduan pengelolaan sampah rumah tangga dan TPS3R serta bank sampah yang memadai.
3. Pembuatan sistem informasi pengelolaan sampah daerah Kabupaten Bandung berbasis website yang dapat mempermudah monitoring pengelolaan sampah yang dilakukan.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

REFERENSI

- Andersson, Camilla, and Jesper Stage. 2018. *Direct and indirect effects of waste management policies on household waste behaviour: The case of Sweden*. Science Direct, Vol. 76, p. 19-27.
- Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 2021. *Volume Produksi Sampah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id>
- Febiana, Rd. Muhamad Rizki Mukti. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 (1), p 114-24.
- Hutagaol, Sahat Maniur, M. Arif Nasution, and Abdul Kadir. 2020. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak Bharat.V*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol. 2 (2), p 204 - 216.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah*. <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Nizar, M., E. Munir, E. Munawar, and Irvan. 2018. *Implementation of Zero Waste Concept in Waste Management of Banda Aceh City*. *Journal of Physics: Conference Series* 1116(5), p 1 - 12.
- Nurlina, Lina, Didin Muhafidin, and Dedi Sukarno. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)*. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 13 (1), p 1-6.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosana, Mira. 2018. *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1(1), p 148-163.
- Santoso, Djonet. 2019. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.